

Krisis Populasi Jepang dan Implikasinya terhadap Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Sektor Ketenagakerjaan

Nina Widyaswasti Aisha, M.Sos
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya
e-mail : ninashaaa@gmail.com

Abstract

Japan is currently experiencing a population crisis, as evidenced by the decreasing number of its inhabitants. This issue arises from the declining rates of marriage and childbirth in Japanese society. The impact of this condition is a reduction in the number of people in the working-age population, which highlights the need for appropriate solutions to ensure that Japan's economy does not decline and its population remains within a safe range. This research examines how Indonesia views the opportunity for cooperation with Japan in the employment sector amid Japan's population crisis. The study uses international cooperation theory. It finds that the cooperation between the two countries has a positive impact in meeting their respective national interests. The influx of Indonesian migrant workers into Japan boosts Japan's economy and, for Indonesia, it enhances the country's visa opportunities.

Keywords: *Japan, International Cooperation, Crisis Population*

Abstrak

Jepang saat ini sedang dilanda krisis populasi yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk. Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan karena berkurangnya angka pernikahan dan kelahiran di masyarakat Jepang. Dampak dari kondisi ini adalah berkurangnya jumlah populasi usia aktif dalam bekerja, sehingga perlunya solusi yang tepat agar perekonomian Jepang tidak menurun dan populasi di Jepang tetap berada di batas aman. Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia melihat peluang guna kerja sama dengan Jepang dalam sektor ketenagakerjaan dalam situasi krisis penduduk yang sedang dialami oleh Jepang. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara memiliki dampak positif dalam memenuhi masing-masing kepentingan nasionalnya. Dengan masuknya pekerja migran Indonesia ke Jepang meningkatkan perekonomian di negara Jepang dan bagi Indonesia hal ini dapat meningkatkan visa negara Indonesia.

Kata Kunci: Jepang, Kerjasama Internasional, Krisis Populasi

Overview

Pentingnya peran penduduk dalam suatu negara dalam keberlanjutan keberadaan atau eksistensi negaranya. Sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dibutuhkan. Menurut Isharyanto dalam buku berjudul Ilmu negara (2016) terdapat 4 (empat) unsur yang menjadi syarat terbentuknya sebuah Negara.

Pertama memiliki wilayah, tidak ada ketentuan yang pasti berapa luas minimum suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai salah satu unsur yang membentuk sebuah negara. Meskipun begitu, adanya wilayah menjadi patokan bahwa area dataran maupun lautan di sekitarnya telah diduduki oleh negara tersebut. *Kedua*, persyaratan bahwa sebuah negara dianggap memiliki pemerintahan yang efektif dapat dianggap sebagai hal sentral dalam klaim telah terbentuknya suatu negara. *Ketiga*, adanya penduduk. Pada dasarnya tidak ada ketetapan yang pasti mengenai jumlah minimum penduduk dalam membentuk suatu negara. Penentu status penduduk adalah ikatan hukum dalam satu kebangsaan. *Keempat*, adanya unsur deklaratif atau pengakuan. Terdapat 2 (dua) jenis pengakuan (Budiarto, 2007), *De Facto* dan *De Jure*. *De Facto* adalah pengakuan atas fakta adanya sebuah negara yang telah terbentuk atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, sedangkan *De Jure* adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia.

Berdasarkan penjelasan terkait terbentuknya negara diatas, dapat terlihat bahwa memiliki penduduk merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam keberlanjutan suatu negara. Apabila tidak adanya penduduk maka negara tidak akan terbentuk. Pemerintahan yang berdaulat membutuhkan warga negara untuk dipimpin dan memimpin.

Sayangnya untuk saat ini terdapat sebuah negara yang sedang mengalami krisis populasi dan diperkirakan di masa depan akan dihadapkan dengan kepunahan, negara tersebut adalah negara Jepang. Krisis populasi penduduk di Jepang mengalami penurunan di setiap tahunnya yang diakibatkan karena berkurangnya angka pernikahan dan kelahiran di masyarakat Jepang. Hal tersebut terjadi karena kekhawatiran masyarakat Jepang akan masalah perekonomian, sehingga masyarakat Jepang enggan untuk menikah dan melahirkan. Masyarakat Jepang berpikiran bahwa menikah dan memiliki anak membutuhkan kesiapan ekonomi yang baik dan mental yang kuat. Adanya peran *gender* rumah tangga tradisional yang membebani perempuan untuk mengelola pekerjaan rumah dan mengasuh anak membuat Wanita Jepang memilih untuk tetap melajang dan mencari uang guna menstabilkan perekonomian mereka hingga masa tua mendatang.

Pandangan pemerintah Jepang melihat kondisi tersebut, mencoba berbagai upaya agar masyarakat Jepang berkenan untuk menikah dan memiliki anak untuk melanjutkan generasi di negara Jepang. Dampak dari berkurangnya populasi di Jepang adalah ketimpangan proporsi pekerja usia produktif dengan pekerja yang memasuki usia lanjut atau lansia. Berkurangnya populasi dan berkurangnya pekerja aktif mengakibatkan penurunan perekonomian di Jepang. Hal ini mendorong pemerintah Jepang untuk membuat kebijakan-kebijakan dalam mendorong peningkatan populasi dan peningkatan perekonomian di Jepang. Pemerintah Jepang melihat bahwa perlunya membuat program kerja dengan mendatangkan pekerja asing yang menggunakan visa kerja atau visa keahlian khusus untuk tenaga kerja asing, dan disebut dengan *Tokutei Ginou*.

Program kerja *Tokutei Ginou* ini didasarkan dari undang-undang kontrol migrasi, *Immigration Control and Refugee Recognition Act* yang telah mengalami beberapa kali amandemen. Dalam implikasinya, Jepang bekerja sama dengan beberapa negara Asia dalam

mendatangkan masyarakat asing sebagai pekerja di Jepang, salah satunya adalah negara Indonesia.

Metodologi

Penulis menggunakan metodologi penulisan deskriptif dengan menggambarkan kebijakan solutif Jepang yang melakukan kerja sama dengan Indonesia dalam mencapai kepentingan masing-masing negara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, atau bahan-bahan berbasis internet terkait kerja sama Jepang dengan Indonesia dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dan dianggap berguna. Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman, makna dan perspektif (Hammarberg et.al, 2016).

Kerjasama Internasional

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan hal yang harus dilakukan dari penyebab munculnya korelasi dan kesulitan dalam kehidupan yang dihadapi masyarakat dalam hubungan internasional. Adapun upaya guna terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan nasional negara menjadi tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional dengan negara lainnya (Zulkifli, 2012). Sedangkan menurut William D. Coplin, kerjasama internasional adalah kerja sama yang awalnya terbentuk dari suatu alasan, yakni negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru serta baik untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama internasional timbul karena keadaan dan keinginan masing-masing negara, serta perbedaan keunggulan masing-masing negara, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negara yang membutuhkan. Dalam kerjasama internasional, prinsip-prinsip saling percaya, menghormati dan menghargai serta aturan-aturan yang berlaku sangatlah penting demi terciptanya ketertiban dan memaksimalkan keuntungan yang dicapai, dan sebagai hasilnya, kerjasama internasional dalam hubungan persahabatan antar negara juga dapat berkembang.

Tujuan utama kerjasama internasional adalah untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang melaksanakan dan menyetujui Kerjasama tersebut. Sesuai dengan elemen kunci yang terdapat dalam konsep Kerjasama internasional Koehane, Kerjasama internasional bertujuan pada aspirasi, bekerja sama untuk menguntungkan kedua belah pihak (Hasanah & Puspitasari, 2019).

Pembahasan

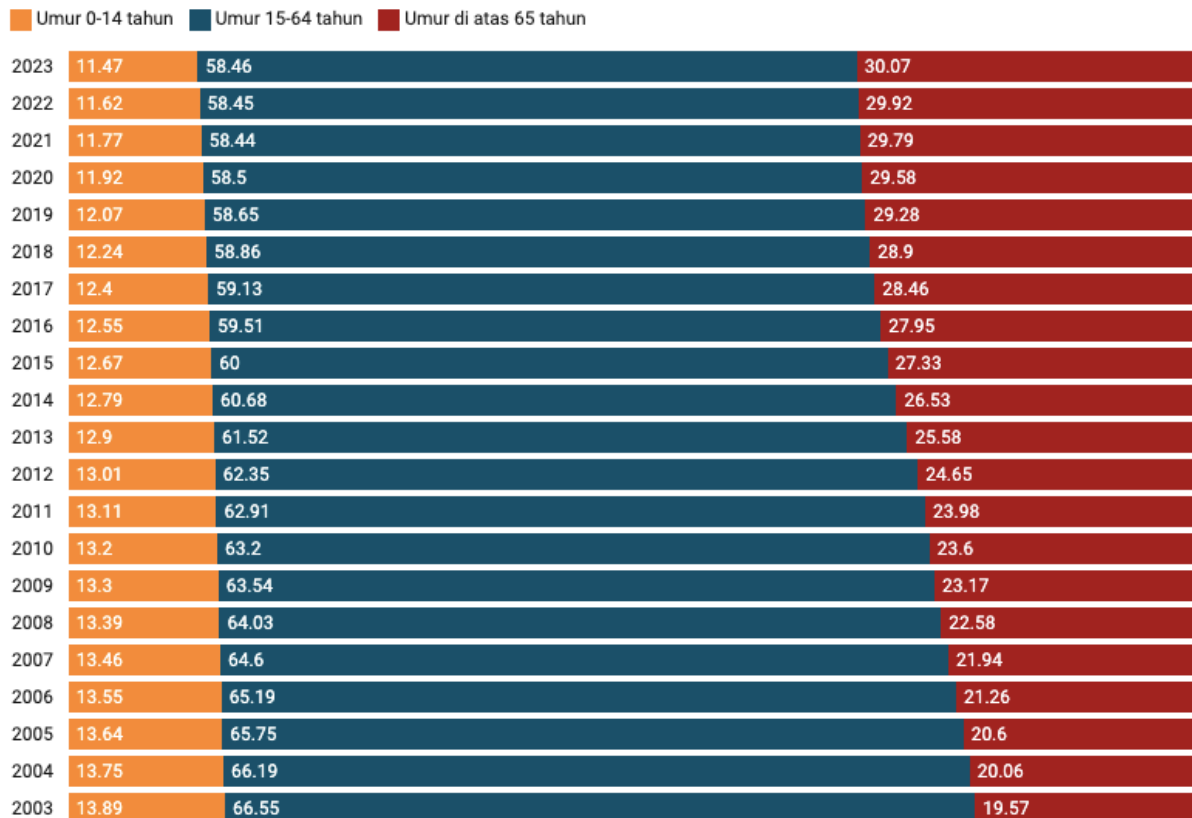
Krisis Populasi di Jepang

Jepang merupakan sebuah negara yang terkenal dengan budaya disiplin yang tinggi, adab yang sangat baik, pekerja keras dan banyak lagi kebiasaan positif warga negara yang dapat kita jadikan panutan hidup. Namun sayangnya, saat ini Jepang sedang dilanda dengan krisis populasi. Krisis ini tidak bisa dianggap remeh, karena kondisi ini memicu kabar bahwa

Jepang akan mengalami kepunahan di masa depan apabila masalah ini tidak segera ditemukan jalan keluarnya.

Krisis populasi di Jepang ini membawa kekhawatiran berkepanjangan bagi pemerintah Jepang. Dengan adanya tren untuk tidak menikah yang terjadi di Jepang, ditambah dengan kasus lain seperti, kematian yang terjadi pada pekerja akibat kelelahan, berdampak pada semakin menurunnya angka pekerja usia produktif di Jepang.

Populasi Jepang (%)



Gambar 1. Populasi Jepang
Sumber: Refinitif dari laman CNBC Indonesia

Berdasarkan pada gambar 1 diatas, terlihat sejak tahun 2003 hingga 2023 populasi Jepang mengalami penurunan pada usia produktif (15-64 tahun) yang berada pada angka 66.55%. Sayangnya, usia lanjut (diatas 65 tahun) mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dimulai pada angka 19.57% di tahun 2003 hingga berada di angka 30.07% di tahun 2023.

Survei menunjukkan bahwa generasi muda Jepang semakin enggan untuk menikah dan atau memiliki anak, hal ini dikarenakan prospek pekerjaan yang sudah tidak menarik, biaya hidup yang tinggi bahkan lebih cepat naik dibandingkan dengan gaji yang diperoleh, dan budaya korporat yang bias *gender* yang menambah beban khususnya pada Wanita dan ibu yang bekerja (Revo, 2024).

Proportion of Never Married at Exact Age 50 by Sex ¹⁾

Year	Males	Females
1950	1.5	1.4
1960	1.3	1.9
1970	1.7	3.3
1980	2.6	4.5
1990	5.6	4.3
2000	12.6	5.8
2010	20.1	10.6
2015 ²⁾	24.8	14.9
2020 ²⁾	28.3	17.8

Tabel 1. Proporsi Tidak Pernah Menikah pada usia 50 tahun
Sumber: National Institute of Population and Social Security Research

Pada tabel diatas menunjukkan perbedaan signifikan akan masyarakat Jepang yang tidak pernah menikah hingga usia mereka mencapai 50 tahun berdasarkan pada *gender*. Baik dari laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki keinginan untuk tidak menikah meskipun usia mereka sudah tidak lagi muda. Penurunan angka tidak menikah sampai usia 50 tahun mencapai 28.3% bagi laki-laki dan 17.8% bagi perempuan di tahun 2020, hal ini merupakan persentase tertinggi yang pernah ada (Statistical Handbook of Japan, 2023).

Rendahnya tingkat pernikahan di Jepang dikarenakan adanya perubahan dalam masyarakat Jepang yang cenderung tidak memiliki keinginan untuk menikah atau menunda pernikahan karena terlalu fokus pada pekerjaannya. Pada generasi modern seperti sekarang ini, perempuan Jepang memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan laki-laki dalam bekerja. Dengan adanya kesetaraan *gender* tersebut, membuat laki-laki maupun perempuan Jepang memiliki kesibukan bekerja sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk menjalin hubungan asmara, sehingga mengesampingkan pernikahan.

Penurunan angka populasi Jepang dimulai setelah Perang Dunia II terjadi. Perang Dunia II merupakan konflik paling mengerikan dan mematikan dalam sejarah umat manusia dimana banyak memakan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berbagai peristiwa yang terjadi pada Perang Dunia II adalah genosida, penggunaan nuklir, kelaparan dan berbagai wabah penyakit yang muncul. Dampak demografis dari Perang Dunia II terhadap Jepang selain tingginya jumlah kematian adalah munculnya fluktuasi tahunan dengan skala besar dalam populasi tingkat prefektur pada tahun 1944 – 1947. Dampak lainnya berupa pemulangan kembali pasukan militer Jepang yang bertugas di luar negeri dan warga sipil dalam skala besar

yang diperkirakan jumlahnya sebanyak 6,6 juta orang. Sejak berbagai kejadian yang terjadi di Jepang, jumlah bayi di Jepang telah menurun selama 25 tahun, bahkan diprediksi lansia akan mencapai 38.32% dari populasi Jepang di tahun 2060. Rendahnya populasi usia muda di Jepang menunjukkan bahwa negara Jepang sulit melakukan regenerasi (Khairally, 2023).

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah Jepang agar masyarakat Jepang bersedia melakukan regenerasi penduduk Jepang demi eksistensi Jepang di masa mendatang. Pemerintah Jepang saat ini telah memberikan dukungan-dukungan bagi pasangan menikah dan pasangan suami istri yang memiliki anak. Dukungan-dukungan tersebut berupa izin cuti melahirkan dan mengurus anak; penambahan fasilitas penitipan anak; hingga material, seperti santunan dana pernikahan, kesehatan, melahirkan, dan tunjangan anak (Kumpanan, 2021).

Penurunan populasi Jepang tidak hanya karena ketidakinginan masyarakat akan menikah dan memiliki anak, namun juga dikarenakan menurunnya angka populasi usia muda mengakibatkan berkurangnya angka pekerja usia produktif di Jepang. Padahal saat ini tidak banyak orang muda di Jepang dapat mengisi semua sektor ketenagakerjaan yang ditambah dengan para pensiunan yang sudah meninggalkan pekerjaannya. Hal ini menandakan bahwa industri terbesar Jepang seperti bidang teknologi, tidak mempunyai tenaga pekerja untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Jika Jepang tidak dapat mempertahankan tingkat produksinya saat ini, tentu Jepang akan kehilangan posisinya sebagai pemilik ekonomi terbesar ketiga di dunia dan sebagai pemimpin teknologi. Ancaman yang seperti itu tentu saja akan “menakuti” Jepang (Jones, 1988).

Kebijakan Jepang sebagai Upaya Solutif dari Krisis Populasi

Menurunnya jumlah tenaga produktif di negara Jepang membuat adanya penurunan investasi. Penurunan yang terjadi menghasilkan perubahan signifikan pada pasokan tenaga kerja yang diakibatkan dari penurunan angka kelahiran dan meningkatnya angka kematian di usia-usia produktif, hal ini kemudian menurunkan tabungan domestik sehingga terjadi penurunan investasi. Perubahan perilaku ekonomi tersebut yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan berpotensi mengancam stabilitas ekonomi (McMorrow dan Roeger, 1999).

Jepang yang merupakan negara dengan status negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat akan segera hancur apabila kondisi krisis populasi di Jepang tidak kunjung membaik. Jepang akhirnya memilih untuk melonggarkan aturan imigrasi agar dapat menarik turis asing untuk bekerja dan tinggal di Jepang. Sebelumnya, negara Jepang menganggap bahwa migrasi merupakan sesuatu yang tidak terlalu penting, Jepang tidak melakukan perekrutan pekerja migran selama Pasca Perang Dunia II ekspansi ekonomi pada 1960-an dan 1970-an. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Jepang berhasil tanpa adanya program migrasi tenaga kerja disebabkan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dimana pekerja Jepang secara internal bermigrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan.

Sejak tahun 1952, Jepang mempunyai kebijakan migrasi yang ditujukan hanya untuk orang asing saja. Kebijakan imigrasi Jepang sangat ketat dan tidak mengakui migran sebagai penduduk tetap pada saat pertama kali datang. Pada reformasi hukum tahun 1989, Pemerintah Jepang mengubah peraturan imigrasi dengan secara eksplisit hanya menerima imigran berketerampilan tinggi. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang tetap berpegang pada kebijakan resminya untuk tidak menerima imigran berketerampilan rendah (Komine, 2018). Undang-undang tersebut mencabut beberapa hak orang asing, seperti akses terhadap asuransi kesehatan publik dan pekerjaan di tempat umum. Meskipun imigrasi Jepang memberikan lebih banyak hak kepada imigran berketerampilan tinggi dibandingkan imigran berketerampilan rendah, imigran *co-ethnic* tetap menjadi kelompok yang diistimewakan. Hal ini tidak mengherankan karena banyak negara memiliki status imigrasi khusus bagi orang yang memiliki keturunan mereka.

Pada tahun 2017, Kementerian Kehakiman Jepang merevisi undang-undang mengenai status penduduk tetap, sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan bagi orang asing untuk mendapatkan status penduduk tetap. Selanjutnya di bulan Maret di tahun yang sama, penduduk asing dapat mengajukan permohonan izin tinggal permanen setelah bekerja sebagai pekerja berketerampilan tinggi selama lima tahun. Undang-undang ini mempertimbangkan kualifikasi pekerja profesional asing, dan dalam kasus khusus izin tinggal permanen diperoleh setelah tiga tahun bekerja atau bahkan setelah satu tahun bekerja dalam kasus khusus (Medrzycki, 2017).

Pada tahun 2018, pemerintah Jepang mengesahkan RUU Amandemen Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, atau Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (*Immigration Control and Refugee Recognition Act*) melalui Diet, yang mengizinkan pekerja asing untuk melakukan pekerjaan manual yang sebelumnya setidaknya secara resmi dilarang.

Selain perubahan mengenai masyarakat asing, kebijakan tersebut juga mencakup pendidikan bahasa Jepang. Tantangan utama bagi para pekerja migran berketerampilan tinggi adalah kendala bahasa. Sebagian besar perusahaan Jepang menggunakan bahasa Jepang sebagai bahasa kerja mereka, yang merupakan tantangan besar bagi orang asing (Morita, 2017).

Mulai April 2019, melalui status visa baru dibawah undang-undang *Immigration Control and Refugee Recognition Act*, Pemerintah Jepang berencana mendatangkan pekerja dari beberapa negara Asia, seperti Vietnam, Cina, Filipina, Indonesia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Taiwan dan Malaysia yang belum memutuskan untuk bergabung. Pemerintah Jepang pun berencana membangun pertukaran informasi bilateral guna mendukung pekerja asing dan membuat kemudahan bagi pekerja asing untuk tinggal di Jepang, seperti membantu membuka rekening Bank.

Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Jepang pada 25 Juni 2019 setelah sebelumnya telah diadakan pertemuan di bulan April tahun 2019. Nota kesepahaman ini ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Kantor Kementerian Tenaga Kerja. Berdasarkan perjanjian

tersebut, pekerja Indonesia dapat mengambil posisi di sektor Ketenagakerjaan kesehatan, pertanian, perikanan, dan otomatis di Jepang.

Menteri Retno mengatakan, melalui kemitraan ini, Indonesia menargetkan dapat memperkerjakan 70.000 orang atau 20% dari total 350.000 pekerja migran yang dibutuhkan Jepang dalam lima tahun ke depan. Lebih lanjut, Menteri Retno mengatakan, kemitraan ini akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan Jepang dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja usia produktif (Yasmin, 2019). Data terbaru yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Jepang sebesar 56% dibandingkan tahun 2019, yaitu tercatat 121.507 orang (Redaksi, 2024).

Dampak kerjasama Jepang – Indonesia dalam sektor Ketenagakerjaan

Kerjasama yang dilakukan oleh negara Jepang sebagai upaya dari masalah yang sedang dihadapi Jepang memberikan dampak yang cukup signifikan. Tidak hanya bagi negara Jepang saja, namun negara Indonesia sebagai salah satu negara yang telah melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan Jepang juga merasakan dampak yang positif. Kerjasama ini menghasilkan peningkatan kesejahteraan baik bagi Jepang maupun Indonesia, yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja usia produktif di Jepang dan kesempatan lapangan pekerjaan bagi Indonesia, mempertahankan kelancaran produktivitas ekonomi bagi negara Jepang dan Indonesia, meningkatkan hubungan kerja sama yang merupakan suatu perwujudan kerjasama yang baik antara kedua negara.

Dengan adanya perubahan yang baik sebagai bentuk upaya Jepang untuk negaranya, yaitu dengan membuka jalan masuknya para pekerja asing di Jepang, menambah catatan masyarakat asing Jepang. Tercatat per Juni 2019 populasi masyarakat asing di Jepang sebesar 2,82 juta yang terdaftar sebagai penduduk Jepang dikarenakan semakin banyaknya magang dan pekerja teknis. Masyarakat asing yang tiba dengan visa insinyur dan layanan internasional sebanyak 256.414 orang dan sebanyak 13.038 orang masuk di bawah visa profesional terampil. Jumlah populasi ini akan terus meningkat disebabkan pemerintah memperkirakan masih ada pekerja asing hingga 47.550 orang yang akan menggunakan visa kerja yang telah disediakan oleh pemerintah Jepang (Kyodo, 2019).

Sektor ketenagakerjaan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023. Sebelum wabah virus *Corona* merebak, sekitar 35.000 orang Indonesia bekerja di Jepang dengan mayoritas peserta magang. Namun, kurang dari satu tahun setelah Jepang dibuka Kembali pasca pandemi, jumlah pekerja migran Indonesia dan pekerja magang di Jepang telah melampaui 90.000 orang. Hingga Juni 2023, 25.000 diantaranya terdaftar sebagai pekerja berketerampilan tinggi. Selanjutnya, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk memasukkan PMI *Specified Skilled Worker* (SSW) dengan skema *private-to-private*. Proses penempatan dan perlindungan PMI akan lebih ditingkatkan dan dipastikan melalui keterlibatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan *Japan Employment Placement Service Provider* (JEPSP) (Kemlu, 2023).

Kerja sama antara Indonesia dan Jepang akan menguntungkan bagi perusahaan penerima di Jepang tentang memperkuat hubungan dengan perusahaan Indonesia, internasionalisasi, manajemen, dan membawa ide-ide baru tentang pekerjaan, produksi, dan manajemen. Keunggulan utama dari kerja sama ini bagi Jepang adalah untuk terus membantu pertumbuhan ekonomi Jepang dengan pekerjaan energi sebagai penggerak perekonomian negara (JICA, 2018). Terlebih dari itu, dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh Jepang, mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja Indonesia. Dampaknya, meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, dimana banyak tenaga kerja Indonesia yang kembali ke nagara asal dengan membawa ilmu dan keterampilan yang berguna untuk pengembangan industri dan menciptakan usaha-usaha baru di tanah air.

Kerja sama ketenagakerjaan ini juga memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta keluarga dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain itu, kesempatan untuk bekerja di Jepang dapat memberikan manfaat dengan membentuk pengetahuan dan karakter kerja masyarakat Jepang, yang positif bagi energi pekerja Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Dengan kerja sama dalam pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang, Indonesia akan mendapatkan devisa dari tenaga kerja yang akan membantu perekonomian negara (Rahmany, 2018).

Kesimpulan

Terjadinya krisis populasi di Jepang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam sektor ketenagakerjaan dengan mengirimkan pekerja Indonesia untuk bekerja pada banyak bidang pekerjaan di Jepang. Krisis populasi yang terjadi di Jepang merupakan peluang bagi negara-negara mitra Jepang dalam sektor ketenagakerjaan, seperti Indonesia, hal ini dikarenakan dalam upaya mengatasi krisis tersebut dan dampaknya, pemerintah melakukan berbagai cara, termasuk memberikan kemudahan bagi pekerja asing untuk dapat bekerja di Jepang. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperluas kerja sama dalam sektor ketenagakerjaan di Jepang.

Adanya kerja sama pada sektor ketenagakerjaan merupakan bentuk upaya realisasi kepentingan kedua negara, bagi Jepang, adanya tenaga kerja Indonesia, membantu mengatasi krisis pekerja yang terjadi seiring dengan menurunnya jumlah penduduk, sedangkan bagi Indonesia, adanya kerja sama tersebut membantu dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia, serta bertambahnya devisa negara Indonesia.

Referensi

Buku:

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016, hal. 36-39.

JICA. *Pembangunan Indonesia dan Kerjasama Jepang: Membangun Masa Depan Berdasarkan Kepercayaan*. 2018.

Liana Hasanah, Viani Puspitasari. *Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2019.

Statistical Handbook of Japan. Japan: Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, 2023.

William D. Coplin. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*. 1971.

Jurnal:

Jones, Rendall S. *The Economic Implications of Japan's Aging Population*. Asian Survey 28(9), 1988, hal. 958-969.

Komine, Ayako. *A Closed Immigration Country: Revisiting Japan as a Negative Case*. Journal of International Migration 56(1), 2018, hal. 1-17.

McMorrow, Kieran dan Werner Roeger. *The Economic Consequences of Ageing Populations: A Comparison of the EU, US and Japan*. European Economy, 1999. Economic Papers 138.

Medyzcki, Kzryzstof. *Pioneering New Immigration Policy in the Contemporary Japan*. The Journal of Migration Studies 3(1), 2017, hal. 68-93.

Morita, Liang. *Why Japan Isn't More Attractive to Highly-skilled Migrants*. Cogent Social Sciences 3(1), 2017.

Internet:

Ayu, I. 2021. *Cara Unik Pemerintah Jepang Dorong Pertumbuhan Penduduknya*. [Online] in <https://kumparan.com/idaayucitraseni/cara-unik-pemerintah-jepang-dorong-pertumbuhan-penduduknya-1vKnkRhpRN/full>. [diakses 27 Agustus 2024]

Kemlu. 2023. *Kaleidoskop KBRI Tokyo 2023 65 Tahun Hubungan Indonesia Jepang, Penguatan Kerja Sama Bilateral, ASEAN & Indo pasifik*. [Online] in <https://kemlu.go.id/tokyo/en/news/27802/kaleidoskop-kbri-tokyo-2023-65-tahun-hubungan-indonesia-jepang-penguatan-kerja-sama-bilateral-asean-indo-pasifik>. [diakses pada 30 Agustus 2024].

Kemnaker. 2022. *Pemerintah Lepas 287 PMI Melalui Program G to G ke Jepang*. [Online] in Twitter Kementerian Ketenagakerjaan RI, <https://twitter.com/KemnakerRI/status/1539785215890972672>. [diakses pada 20 Agustus 2024]

Khairally, E.T. 2023. *Jepang Mengalami Penurunan Jumlah Penduduk. Hal Tersebut Terjadi Karena?*. [Online] in <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6905195/jepang-mengalami-penurunan-jumlah-penduduk-hal-tersebut-terjadi-karena>. [diakses pada 19 Agustus 2024]

- Kyodo. *Foreign Population in Japan Breaks Record With 2.82 Million*. [Online] in <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/10/26/nation/foreign-populationjapan-breaks-record-2-82-million/#.XbjQJ2JR3IU>. [diakses pada 30 Agustus 2024].
- Redaksi. 2024. *Warga RI Ramai-Ramai Pindah Kerja Ke Jepang*. [Online] in <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240203122225-4-511425/warga-ri-ramai-ramai-pindah-kerja-ke-jepang-ini-alasannya>. [diakses pada 29 Agustus 2024].
- Revo, M. 2024. *Krisis Penduduk Jepang Semakin Parah, RI Bisa Kena Sial*. [Online] in <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240726135546-128-557896/krisis-penduduk-jepang-semakin-parah-ri-bisa-kena-sial>. [diakses pada 29 Agustus 2024].
- Yasmin, N. 2019. *Japan and Indonesia to Boost Skilled Workforce Cooperation* [Online] in <https://jakartaglobe.id/context/japanand-indonesia-to-boost-skilledworkforce-cooperation/>. [diakses pada 25 Agustus 2024].